



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;

b. bahwa dalam rangka menggerakkan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dibentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Penanggung Jawab yang membawahi 9 (sembilan) Kelompok Kerja yang meliputi:

1. manajemen perubahan;
2. deregulasi kebijakan;
3. penataan organisasi;

4. penataan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. penataan tatalaksana;
5. penataan sumber daya manusia dan aparatur;
6. penguatan akuntabilitas;
7. penguatan pengawasan;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
9. *quick wins*.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memastikan bahwa arahan dari Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	TIM REFORMASI BIROKRASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH		
1.	Menteri PPPA	Ketua
2.	Sekretaris Kementerian	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
4.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
8.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
PENANGGUNG JAWAB		
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
4.	Kepala Biro Data dan Informasi	Anggota
5.	Inspektur	Anggota
6.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
7.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
8.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9.	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
10.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Sekretaris
3.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro SDM dan Umum/Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Ketua
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas/Koordinator Bidang Hukum	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas/Koordinator Bidang Kerjasama	Anggota
4.	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN ORGANISASI		
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Ketua
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro SDM dan Umum/Koordinator Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3.	Statistika Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi/Koordinator Bidang Data Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan	Anggota
4.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan dan Anggaran	Anggota
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
6.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA		
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Ketua
2.	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi/Koordinator Bidang Teknologi Informasi	Sekretaris
3.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro SDM dan Umum/Koordinator Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
4.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas/Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Statistika Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi/Koordinator Bidang Data Anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anggota
6.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang Keuangan	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/ Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
11.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR		
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Ketua
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro SDM dan Umum/Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang Perencanaan dan Anggaran	Sekretaris
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	Keuangan	
4.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Pemenuhan Hak Anak	Anggota
8.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Inspektur Kementerian	Ketua
2.	Auditor Madya	Sekretaris
3.	Auditor Muda	Anggota
4.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas/Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang Keuangan	Anggota
6.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
7.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
8.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
9.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Pemenuhan Hak Anak	
10.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Ketua
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro SDM dan Umum/Koordinator Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas/Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Anggota
5.	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi/Koordinator Bidang Teknologi Informasi	Anggota
6.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya/Koordinator Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
KELOMPOK KERJA <i>QUICK WINS</i>		
1.	Kepala Biro Data dan Informasi	Ketua
2.	Statistika Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi/Koordinator Bidang Data Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan	Sekretaris





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas/Koordinator Bidang Hukum	Anggota
5.	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan/Koordinator bidang Perencanaan dan Anggaran	Anggota
7.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
8.	Analisis Anggaran Ahli Madya /Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
9.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
10.	Analisis Anggaran Ahli Madya /Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Pemenuhan Hak Anak	Anggota
11.	Analisis Anggaran Ahli Madya /Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

